

KOMITMEN DAN PENGGUNAAN APARAT PEMERINTAH DAERAH TERHADAP SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIKD) : PERSPEKTIF PERUBAHAN PARADIGMA

11

Muchamad Syafruddin
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

ABSTRACT

There are two objectives of this study. The first objective is to investigate whether there is difference between degree of commitment and use of regulation of decentralization before and after socialization and technical assistant. The second objective of this study is to identify, investigate, analyze and formulate design of region financial information systems. Refer to the first objective; the null hypothesis of this study is that there is no difference between degree of commitment and use of regulation of decentralization before and after socialization and technical assistant. To test the hypothesis mentioned above, Mann Whitney is used to conclude whether the hypothesis can be rejected or not.

The result of this study shows that the null hypothesis can be rejected on all of the cases. We can also conclude that comparison between the old and the new design of region financial information systems are very differences both on theory, paradigm, and law basis.

Keywords : *commitment and use of regulation of decentralization; design of region financial information systems*

A. Latar Belakang

Fokus isu penelitian adalah **seberapa jauh dan bagaimana** meningkatkan kualitas sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah (pemda), khususnya mengenai komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Untuk mengetahui seberapa jauh dan bagaimana meningkatkan kualitas sikap dan perilaku aparat pemda terhadap aturan tentang Otda, khususnya aturan tentang SIKD, penelitian ini membagi isu atau masalah penelitian ke dalam tiga titik waktu penelitian.

Titik waktu penelitian 1 yang merupakan **isu penelitian 1** adalah seberapa jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sebelum** rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. Titik waktu penelitian 2 yang merupakan **isu penelitian 2** adalah model rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang bisa disusun, disampaikan dan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Titik waktu penelitian 3 yang merupakan **isu penelitian 3** adalah seberapa jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sesudah** rekonstruksi dan penyampaian

rancangan SIKD baru. Maksud rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru adalah peneliti melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis (*technical assistant*) kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern. Penjelasan dan argumentasi yang mendasari isu penelitian 1, isu penelitian 2 dan isu penelitian 3 tersebut adalah sebagai berikut.

Perancangan SIKD tidak bisa dilepaskan dari sikap dan perilaku aparat pemda, oleh karena itu isu penelitian 1 dan 3 adalah bagaimanakah aparatur pemda mensikapi, mempersepsi dan menggunakan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD dalam praktik sehari-hari. Aparatur pemda adalah subjek penerima berbagai regulasi atau aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Ada dugaan kuat bahwa sikap, persepsi dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan SIKD, masih sangat minimal. Oleh karena hal ini, secara spesifik **isu penelitian 1** adalah seberapa jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sebelum** rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. **Isu penelitian 3** adalah seberapa jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat daerah terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sesudah** rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. Mengacu pada isu penelitian 2, penelitian ini menghasilkan rekonstruksi rancangan SIKD modern. Maksud rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru adalah peneliti melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern.

Hal yang mendasari penelitian terhadap tingkat komitmen dan penggunaan aparat daerah terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD adalah sebagai berikut. Sesuai dengan teori hubungan kausalitas *attitude* dan *behavioral* Fishbein dan Ajzen (1975) yang ada di **gambar B.1.**, argumentasi yang menunjukkan keterkaitan antara komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda adalah bahwa kualitas komitmen akan menentukan kualitas penggunaan (manfaat/benefit) Otda. Komitmen aparat pemda terhadap aturan tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana proses aturan Otda tersebut ditetapkan. Aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebagai basis penetapan rancangan SIKD, yang ditetapkan dengan benar (sebagai *facilitating conditions*) akan meningkatkan pemahaman dan persepsi yang benar, berarti juga meningkatkan kualitas komitmen yang tinggi, selanjutnya meningkatkan kualitas persepsi dan penggunaan aturan Otda. Apabila dua kondisi psikologis tentang komitmen di atas rendah, dapat diprediksi bahwa kinerja aparat pemerintah juga rendah, demikian sebaliknya. Secara ringkas, hubungan rekonstruksi rancangan SIKD dengan sikap dan perilaku, lihat gambar B.1.

Argumentasi yang mendasari penelitian yang bertujuan untuk memperoleh model rekonstruksi rancangan SIKD modern yang cocok (*fit*) dan tepat (*proper*) bagi pemerintahan daerah pada era Otda sekarang ini adalah sebagai berikut. Pada masa pemerintahan sentralistik (orde baru), SIKD di seluruh Indonesia diatur dalam undang-undang (UU) nomor 5 tahun 1974, dilengkapi dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 5 tahun 1975 dan peraturan pemerintah (PP) nomor 6 tahun 1975. Atas dasar tiga aturan ini, pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900 – 099 tentang **manual administrasi keuangan daerah (MAKUDA)** pada tahun 1981 yang pada era sekarang ini disebut **sistem informasi keuangan daerah (SIKD)**. Beberapa contoh formulir, dokumen, dan model laporan pertanggung jawaban keuangan daerah ada dalam MAKUDA. MAKUDA inilah yang akhirnya menjadi pedoman atau manual yang berfungsi sebagai SIKD yang harus dijalankan sama/

seragam bagi seluruh daerah di Indonesia. Pada dasarnya, SIKD lama (MAKUDA) memuat pedoman mengenai bagaimana pemerintahan daerah harus memproses dan memutuskan perencanaan keuangan daerah (Perda tentang APBD), melaksanakan keuangan daerah (APBD), dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah (APBD) dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Secara ringkas, perbandingan dasar hukum dan model konstruksi dan rekonstruksi rancangan SIKD, lihat gambar B.2.

Seiring dengan jatuhnya orde baru yang berarti terjadinya perubahan dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik (Otda), pemerintah menetapkan berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, sebagai pengganti berbagai aturan tentang SIKD lama (MAKUDA). Aturan pengganti ini harus menjadi basis perekonstruksian dan penetapan rancangan SIKD modern. Berbagai aturan pengganti ini meliputi UU no. 22 tahun 1999, UU no. 25 tahun 1999, dilengkapi dengan PP no. 104 hingga no. 110 tahun yang sama, yaitu tahun 2000, dan aturan lainnya.

Konsekwensi ditetapkannya aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD adalah setiap pemda harus merekonstruksi dan menetapkan kembali rancangan SIKD baru sebagai ganti SIKD lama (MAKUDA) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. **Kenyataannya** adalah pemda tidak siap untuk merekonstruksi dan menetapkan rancangan SIKD masing-masing. Ini bisa dipahami, sebab untuk merekonstruksi dan menetapkan rancangan SIKD dibutuhkan kapasitas, kapabilitas, kemampuan (*skills*) dan profesionalitas aparat pemda yang cukup memadai. Kapasitas, kapabilitas, kemampuan dan profesionalitas aparat inilah yang sekarang tidak ada sehingga tidak siap untuk merekonstruksi dan menetapkan , rancangan SIKD. Dengan kata lain, pada saat ini di seluruh Indonesia hampir terjadi kekosongan berkaitan dengan SIKD modern yang bersifat desentralistik. Tanpa SIKD yang memadai ini, pengelolaan keuangan Negara di daerah menjadi sulit untuk dipahami dan menimbulkan pertanyaan, yaitu akuntabel dan transparankah keuangan negara yang dikelola oleh pemerintahan daerah pada era Otda saat ini?

Ketidakadaan SIKD dan kewenangan yang besar yang dimiliki pemda, baik menyangkut kewenangan pemerintahan (politik/kekuasaan) maupun kewenangan keuangan, membawa dampak negatif yang juga besar. Tanpa campur tangan pemerintah pusat, pemerintahan daerah mengelola keuangan Negara yang berasal dari APBD seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2004 sebesar kurang lebih Rp250.000.000.000.000 (dua ratus lima puluh trilyun rupiah) dengan tidak optimal. Dari jumlah ini, sekitar 40% atau Rp 100.000.000.000.000,- (seratus trilyun rupiah) diperuntukkan bagi belanja rutin yang mencakup belanja pegawai dan belanja administrasi kantor pemda. Sekitar 60% atau Rp 150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh trilyun rupiah) untuk belanja proyek atau pembangunan daerah yang sekarang disebut sebagai belanja kegiatan daerah. Jika uang negara sebesar ini dikelola secara efisien, efektif, tanpa pemborosan dan pembocoran dan atas dasar prinsip *good* dan *clean government* yang mengharuskan adanya SIKD yang memadai (*fit* dan *proper*), bukan mustahil masalah kemiskinan, kesempatan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi dan masalah lain dapat diatasi.

Dengan jumlah dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara di daerah yang sangat besar, namun tidak didukung oleh penggunaan SIKD modern dan tingkat komitmen terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD yang tidak memadai, maka dampak negatif berupa pelayanan publik (*public services*) yang berkualitas demikian rendah tak terhindarkan lagi. Fakta di lapangan/praktik menunjukkan bahwa pelayanan surat menyurat (contoh STNK, KTP, Akte Kelahiran, IMB, dan lain-lain) berjalan tidak efisien bahkan sering kali merupakan sumber 'pemerasan' oleh aparat pemda. Belum lagi masalah-masalah besar lain yang juga tidak berjalan lebih efisien atau lebih baik dibanding pada

masa orde baru. Masalah-masalah lain ini adalah menyangkut aspek pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan, olah raga, kepariwisataan, dan pertanian. Fungsi pemda untuk mendorong dan memfasilitasi berjalannya aspek-aspek ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Secara hipotesis dapat disimpulkan bahwa keuangan Negara dari APBD sebesar Rp 150.000.000.000.000,- (seratus lima puluh trilyun rupiah) berupa belanja pembangunan, seharusnya bisa menjadi stimulan ataupun dorongan kegiatan ekonomi di daerah untuk mengurangi masalah pengangguran, kemiskinan, ataupun meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. **Kenyataannya** adalah hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak efisien dan tidak optimal pemanfaatannya, bahkan telah banyak diselewengkan atau dikorupsi. Fakta dalam praktik menunjukkan bahwa banyak berkas-berkas pertanggungjawaban keuangan telah tersusun rapi (bahkan sering kali juga tidak rapi) namun proyek/pembangunan/kegiatan pada dasarnya tidak ada atau fiktif. Fakta empiris lainnya menunjukkan bahwa sekarang ini sebagian kasus korupsi yang dilakukan legislatif (DPRD) telah mulai dimintakan pertanggungjawabannya melalui institusi pengadilan. Bisa dinyatakan bahwa kasus-kasus korupsi DPRD ini merupakan kasus-kasus korupsi yang jauh lebih kecil dibanding keadaan sebenarnya. Prosentase kuantitas anggota DPRD yang sekarang menjadi sorotan publik dari seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia masih terlampau kecil, yaitu hanya sekitar 2,5% (Suara Merdeka, 23 Agustus 2004, hal. 3). Belum lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh eksekutif (aparatus pemda) yang luput atau tidak menjadi sorotan publik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dua hal yaitu (1) pada saat ini tidak ada SIKD daerah yang memadai sebagai akibat ditetapkan berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, (2) dampak negatif yang lebih besar sebagai akibat tidak adanya SIKD yang memadai, dibanding manfaat atas ketetapan Otda. Jadi dalam jangka pendek (masa transisi), Otda di Indonesia merupakan keputusan politik yang lebih banyak membawa dampak negatif (*cost*) dibanding dampak positifnya (manfaat/benefit). Dalam jangka panjang (masa yang tidak terlalu lama), secara teoritis, Otda di Indonesia seharusnya merupakan keputusan politik yang jauh lebih banyak membawa dampak positif (manfaat/benefit) dibanding dengan dampak negatif (*cost*). Ini bisa tercapai apabila segala usaha dari segala lapisan masyarakat termasuk masyarakat perguruan tinggi dilakukan secara simultan untuk memperbaiki jalannya Otda. Oleh karena penelitian ini berfokus pada SIKD sebagai media untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, benar, dan transparan; pertanyaan atau **isu penelitian 2** adalah model rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang bisa disusun, disampaikan dan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Hasil yang diharapkan atas solusi terhadap isu penelitian 2 adalah pengelolaan keuangan Negara di daerah menjadi akuntabel dan transparan. Dampak selanjutnya adalah terjadinya proses penghilangan dampak negatif Otda, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang berprinsip pada *good, clean and transparent government*.

B. Perumusan Masalah dan Manfaat Penelitian

Dari uraian yang ada di bagian Latar Belakang, kesimpulannya adalah bahwa (1) Otda bukanlah sebuah proses sekali jadi, melainkan proses yang membutuhkan waktu dan berbagai faktor pendukung. Faktor pendukung meliputi (a) sikap dan perilaku aparat pemda terhadap Otda, khususnya pada SIKD

modern, dan (b) rekonstruksi rancangan SIKD modern yang memadai (*fit dan proper*). (2) Saat ini, Otda lebih banyak memberikan dampak negatif (*cost*), baik kepada aparat pemda maupun kepada masyarakat luas. (3) Akuntabilitas dan derajat transparansi pelayanan publik oleh aparat pemda menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

Atas dasar kesimpulan di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah (1) Seberapa jauh tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru. Maksud rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru adalah peneliti melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD; dan (2) Model rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang bisa disusun, disampaikan dan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD.

Mengacu pada rumusan masalah, penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat atau kontribusi bagi berbagai pihak. Pihak-pihak ini adalah (a) teoritis yang berkepentingan terhadap teori kausalitas antara *attitude* dan *behavior*, maupun teoritis yang berkepentingan dengan bidang sistem informasi, khususnya SIKD, dan (b) praktisi pembuat kebijakan, maupun praktisi pengguna aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD.

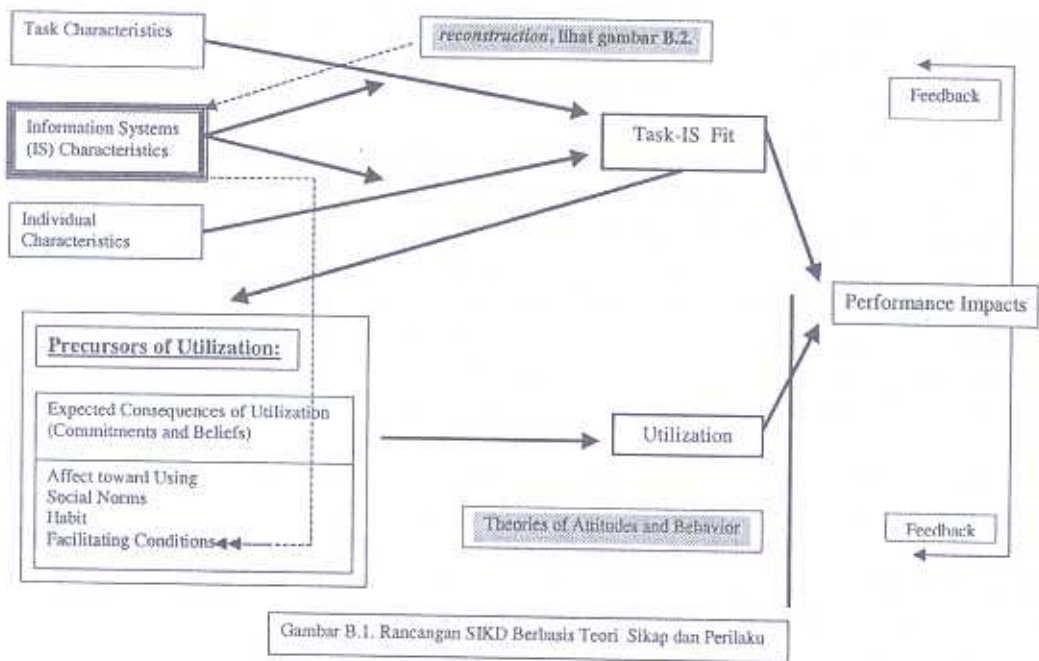
Output penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan dan pengujian teori psikologi sosial. Bagi para teoritis, baik di bidang aplikatif seperti akuntansi, keuangan, sistem informasi maupun ilmu murni seperti bidang psikologi (khususnya psikologi sosial), sosiologi, dan bahkan mungkin antropologi, proses penelitian maupun hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengingat masih terbatasnya penelitian-penelitian seperti ini di Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini mempunyai kontribusi yang besar bagi pengembangan maupun ekstensi bidang aplikatif seperti akuntansi, keuangan dan sistem informasi, maupun ilmu murni seperti bidang psikologi (khususnya psikologi sosial), sosiologi, dan bahkan mungkin antropologi.

Bagi pihak praktisi, output penelitian ini merupakan pedoman bagi aparat pemda dalam menerapkan model manajemen baru (penyusunan APBD, perubahan APBD, pelaksanaan APBD, dan aspek manajemen lain) yang dinyatakan dalam berbagai peraturan tentang Otda. Bagi praktisi perumus dan penentu kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan input dalam mengevaluasi, mengendalikan, menginvestigasi, umpan balik (*feed back*), dan memperbaiki proses penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, secara berkesinambungan (*continuous improvement*). Dengan asumsi bahwa kebijakan Otda bukan proses sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan sistem monitoring yang cukup, maka proses dan hasil penelitian menjadi sangat krusial dan esensial.

C. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Di sub bagian ini, dijelaskan dua hal, yaitu (1) teori sebagai basis landasan pengembangan hipotesis, dan (2) pengembangan hipotesis. Secara umum dan ringkas, landasan teori tercermin pada dua gambar, gambar B.1. dan B.2. Gambar B.1. merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian 1 dan isu penelitian 3, sedang gambar B.2. merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian 2.

Integrasi dan keterpaduan antara pengembangan praktik yang dalam penelitian ini berupa produk teknologi, rancangan SIKD, dengan pengembangan teori hubungan kausalitas sikap dan perilaku tampak pada gambar B.1. berikut.



Secara umum, gambar B.1. menunjukkan teori hubungan kausalitas antara sistem informasi, sikap, dan perilaku. Dari gambaran umum ini, peneliti mengembangkan letak rekonstruksi rancangan SIKD dalam teori hubungan kausalitas antara sistem informasi, sikap, dan perilaku. Berdasarkan pada hubungan letak rekonstruksi rancangan SIKD dengan teori kausalitas antara sistem informasi, sikap, dan perilaku, gambar B.1. bisa disebut sebagai rekonstruksi rancangan SIKD berbasis pada teori perilaku. Rekonstruksi rancangan SIKD berbasis pada teori perilaku berkedudukan dan berfungsi sebagai salah satu bentuk *facilitating conditions* yang diestimasikan meningkatkan kualitas sikap dan perilaku aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap SIKD.

Selain hal di atas, gambar B.1. merupakan model konseptual atau model teoritis (model perubahan sosial) yang diidentifikasi, dikembangkan, dianalisis dan dirumuskan atas dasar berbagai penelitian dan teori-teori perubahan sosial yang telah terumuskan terdahulu. Model konseptual dasar yang dirumuskan dan digunakan dalam penelitian ini dikembangkan atas dasar teori tindakan logis (*theory of reasoned action*) yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori memodelkan perilaku nyata seseorang sebagai fungsi keinginan berperilaku (*behavior intentions*). Keinginan berperilaku seseorang ditentukan oleh sikap dan perilaku, dan juga ditentukan oleh seperangkat norma-norma subjektif tentang perilaku yang dimaksud. Sikap seseorang terhadap perilaku spesifik merupakan fungsi komitmen dan evaluasi subjektif seseorang terhadap norma-norma. Jadi perilaku seseorang merupakan fungsi komitmen dan motivasi untuk memenuhi norma tersebut. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komitmen adalah komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD.

Secara teoritis, komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda bisa dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk komitmen yaitu, (a) komitmen *affective*, (b) komitmen *continuance*, dan (c) komitmen *normative* (Meyer dan Allen 1991). Komitmen *affective* adalah komitmen dan yang terkait dengan pembentukan perasaan emosional seseorang terhadap sesuatu yang disebabkan karena orang tersebut mengidentifikasi adanya tujuan sesuatu tersebut dan orang tersebut berkeinginan untuk membantu mencapai tujuan sesuatu tersebut.

Komitmen *continuance* adalah komitmen dan yang terkait dengan keinginan seseorang untuk memelihara hubungannya terhadap sesuatu, karena bila orang tersebut meninggalkan hubungannya terhadap sesuatu tersebut, biaya (*cost*) yang muncul jauh lebih besar dibanding jika tetap memelihara hubungan. Jadi komitmen jenis ini ada, bukan karena perasaan emosional orang tersebut. Komitmen *normative* adalah kondisi seseorang untuk tetap tinggal pada situasi sesuatu, karena orang tersebut merasa sudah seharusnya dia berada dalam situasi sesuatu tersebut. Pengertian komitmen dalam penelitian ini berkaitan dengan (a) kondisi psikologis aparat pemda yang dikarakterkan oleh pemahaman aparat pemda terhadap aturan Otda; dan (b) kondisi psikologis aparat pemda yang mempunyai implikasi terhadap keputusan aparat pemda, yaitu apakah akan menggunakan aturan Otda atau tidak menggunakan aturan Otda.

Model teori tindakan logis yang dikembangkan dan dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) di atas merupakan model teori yang menjadi dasar untuk mengembangkan dan merumuskan model penelitian bagi penelitian ini. Secara lebih rinci, model penelitian ini selanjutnya merupakan model penelitian teoritis yang menjelaskan dan memprediksi bagaimana aparat pemda menerima seperangkat peraturan Otda, khususnya berkaitan dengan perekonstruksian rancangan SIKD, yang demikian luas dan kompleks. Sedemikian luas dan kompleksnya aturan Otda, khususnya berkaitan dengan perekonstruksian rancangan SIKD ini, sehingga untuk memahami dan menerapkan dalam praktik kerja sehari-hari, dibutuhkan kemampuan dan skills teknis tertentu

Jika gambar B.1. di atas merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian 1 dan isu penelitian 3, gambar B.2. di bawah berikut merupakan jawaban teoritis bagi isu penelitian 2. Secara umum, gambar B.2. menunjukkan perbandingan konstruksi dan rekonstruksi rancangan SIKD yang menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban (laporan) APBD. Gambar B.2. juga menunjukkan **perubahan paradigma SIKD**.

Tampak pada gambar B.2. bahwa konstruksi rancangan SIKD lama (MAKUDA) merupakan SIKD yang dikonstruksi oleh pemerintah pusat berdasar pada aturan-aturan yang juga ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara seragam/sama untuk seluruh daerah kabupaten, kota, dan propinsi di Indonesia. **Kontras** dengan rancangan SIKD lama adalah bahwa rekonstruksi rancangan SIKD modern harus didasarkan pada berbagai faktor, yaitu (a) SIKD lama (MAKUDA), (b) aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, (c) aturan lokal daerah, (d) literatur SIKD modern, dan (e) teori hubungan kausalitas antara sikap dan perilaku dalam perancangan SIKD modern. **Kontras lainnya** adalah SIKD modern ini berlaku beragam sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Inilah yang dimaksud dengan **perubahan paradigma**. Jadi perubahan paradigma adalah perubahan dari proses konstruksi SIKD lama yang hanya mendasarkan pada aturan dan berlaku seragam, menuju rekonstruksi rancangan SIKD baru berdasarkan pada berbagai faktor dan berlaku beragam sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.



Gambar B.2. Perbandingan Dasar Hukum dan Model Rekonstruksi Rancangan SIKD : Perspektif Perubahan Paradigma

Atas dasar isu penelitian yang telah dijelaskan di bagian Latar Belakang dan Landasan Teori di atas, berikut dirumuskan hipotesis. Ada dua isu penelitian pokok dalam penelitian ini, yaitu (1) Seberapa jauh dan bagaimana meningkatkan kualitas aspek sikap aparat pemda, khususnya mengenai aspek komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tentang Otda, khususnya aturan tentang SIKD; dan (2) rekonstruksi rancangan SIKD apa dan bagaimana yang cocok (*fit*) dan memadai (*proper*) untuk satu pemerintahan daerah pada masa perubahan (Otda) sekarang ini.

Jawaban tentatif atau hipotesis atas dua masalah penelitian tampak pada gambar B.1. dan gambar B.2. sebagai landasan teori. Atas dasar gambar B.1., jawaban tentatif atau hipotesis terhadap isu penelitian 1 dan isu penelitian 3 adalah bahwa rekonstruksi rancangan SIKD yang tepat dan benar yang mencerminkan adanya perubahan paradigma (dari sentralistik/seragam ke desentralistik/

keberagaman) adalah proses rekonstruksi dan penetapan rancangan SIKD yang mempertimbangkan dan berdasarkan secara cermat pada teori hubungan kausalitas antara *attitude* dan *behavior* manusia dalam rekonstruksi dan penetapan rancangan SIKD tersebut.

Rekonstruksi dan penetapan rancangan SIKD harus dipandang sebagai bagian dari upaya memanipulasi faktor yang berperan besar dalam meningkatkan kualitas aspek komitmen, selanjutnya akan meningkatkan penggunaan aturan tentang SIKD. Tujuan manipulasi terhadap faktor ini adalah untuk menciptakan penfasilitasan kondisi (*facilitating conditions*) yang memadai yang merupakan upaya meningkatkan komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya berkaitan dengan aturan tentang SIKD. Lihat kembali gambar B.1. Dengan telah adanya SIKD sebagai syarat munculnya penggunaan (*precursors of utilization*) SIKD modern, maka perubahan sikap dan perilaku terhadap SIKD bukan merupakan hal yang mustahil. Selanjutnya dapat diharapkan adanya dampak kinerja aparat pemerintah yang selanjutnya meningkatkan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan. Atas dasar uraian ini, **rumusan hipotesisnya** adalah:

Ho: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sebelum** dan **sesudah** rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD baru.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai **penelitian eksperimen murni**. Ada 3 waktu dalam eksperimen ini, yaitu titik waktu (a) **sebelum**, (b) **saat**, dan (c) **sesudah** sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana mempersepsikan, mensikapi, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern. Penelitian eksperimen ini berkaitan dengan isu penelitian 1 dan isu penelitian 3.

Pada titik waktu sebelum sosialisasi dan bimbingan teknis, peneliti melakukan pengukuran mengenai tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD. Demikian halnya pada titik waktu sesudah sosialisasi dan bimbingan teknis, peneliti juga melakukan pengukuran mengenai tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD. Jadi, ada **treatment**, yaitu **apa dampak** sosialisasi dan pendampingan teknis kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana mensikapi, mempersepsikan, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern **pada** tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan SIKD.

Sedang berkaitan dengan isu penelitian 2, penelitian bisa dikategorikan sebagai **penelitian operational/action**. Atas dasar berbagai faktor, peneliti menyusun rekonstruksi rancangan SIKD modern. Berbagai faktor meliputi (a) pustaka relevan tentang SIKD modern, (b) pustaka relevan tentang teori kausalitas *attitude* dan *behavior*, khususnya tentang komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, (c) aturan-aturan lama dan baru tentang SIKD, (d) aturan-aturan lokal tentang SIKD, dan (e) SIKD yang sedang berlaku dan berjalan yang digunakan dalam kerja sehari-hari.

Tidak semua aspek sikap aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya terhadap SIKD sebagaimana tampak pada gambar B.1. diteliti. Oleh karena itu, **langkah-langkah penelitian** untuk menjawab **isu penelitian 1 dan isu penelitian 3** ataupun **hipotesis** meliputi **(A) Identifikasi**, analisis dan tinjauan literatur teoritis tentang hubungan kausalitas antara sikap dan perilaku aparat pemda, khususnya komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru Otda, khususnya aturan tentang SIKD; **(B) Pengukuran** dan analisis terhadap tingkat komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru Otda,

khususnya aturan tentang SIKD **sebelum** dan **sesudah** sosialisasi dan pendampingan (*technical assistant*) kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern; (C) **Perekonstruksian**, penyusunan, penetapan dan penyampaian rancangan SIKD. Rekonstruksi dan penyampaian rancangan SIKD ini harus dipandang sebagai bagian dari penfasilitasan kondisi (*facilitating conditions*) yang merupakan upaya agar terjadi peningkatan komitmen aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, selanjutnya terjadi peningkatan kualitas penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD. Langkah penelitian ini sama dengan langkah penelitian di poin g., yang berkaitan dengan isu penelitian 2.; (D) **Sosialisasi dan pendampingan teknis** kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana mensikapi, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern; dan (E) **Pembandingan** tingkat komitmen dan penggunaan terhadap aturan baru Otda, khususnya aturan tentang SIKD **sebelum** dan **sesudah** sosialisasi dan pendampingan kepada pengguna SIKD mengenai apa dan bagaimana mensikapi, menggunakan dan menerapkan rekonstruksi rancangan SIKD modern.

Mengacu pada gambar B.2., langkah-langkah penelitian untuk menjawab **isu penelitian 2**, meliputi (A) **Identifikasi**, analisis, dan penyimpulan-penyimpulan terhadap (a) berbagai aturan lama (UU no. 5 tahun 1974, PP no. 5 tahun 1975 dan PP no. 6 tahun 1975) berkaitan dengan rancangan SIKD lama yang disebut manual administrasi keuangan daerah/MAKUDA 1981; (b) manual atau buku pedoman SIKD lama (MAKUDA 1981); (c) praktik SIKD lama (MAKUDA, 1981) yang sedang berlaku dan berjalan; (d) berbagai aturan baru (UU no. 22 tahun 1999, UU no. 25 tahun 1999, PP no. 104 tahun 2000, PP no. 105 tahun 2000, PP no. 106 tahun 2000, PP no. 107 tahun 2000, PP no. 108 tahun 2000, PP no. 109 tahun 2000, PP no. 110 tahun 2000, dan lainnya) berkaitan dengan rekonstruksi rancangan SIKD; dan (e) literatur teoritis berkenaan apa dan bagaimana melakukan rekonstruksi rancangan SIKD modern.; (B) **Pembandingan**, analisis, dan penyimpulan-penyimpulan terhadap **aturan lama** (UU no. 5 th. 1974, PP no. 5 th. 1975 dan PP no. 6 th. 1975) dan **aturan baru** (UU no. 22 th. 1999, UU no. 25 th. 1999, PP no. 104 th. 2000, PP no. 105 th. 2000, PP no. 106 th. 2000, PP no. 107 th. 2000, PP no. 108 th. 2000, PP no. 109 th. 2000, PP no. 110 th. 2000, dan aturan lainnya).; dan (C) **Perekonstruksian**, penyusunan, penetapan, dan penyampaian rancangan SIKD modern sebagai ganti SIKD lama (MAKUDA, 1981). Langkah penelitian ini sama dengan langkah penelitian di poin c., yang berkaitan dengan isu penelitian 1 dan 3.

Atas dasar uraian di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok, yaitu (1) kajian empiris dan (2) kajian teoritis. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian berarti mempunyai dua karakteristik data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer disurvei dan diperoleh di **Kabupaten Indragiri Hilir**. Penelitian dilakukan selama tahun 2003. Untuk menjawab isu penelitian 1 dan 3, data primer yang dihimpun meliputi:

1. Data demografi responden yang terlibat dalam rekonstruksi rancangan dan penggunaan SIKD.
2. Data tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya tentang SIKD.

Data primer tersebut diperoleh dengan cara melakukan survei lapangan di tempat praktik kerja sehari-hari terhadap aparat pemda yang terlibat dalam rekonstruksi rancangan dan penggunaan SIKD. Aparat pemda meliputi sekretaris daerah dan DPRD, kepala badan, kepala dinas, dan pimpinan-pimpinan operasional merupakan sampel penelitian. Mereka akan diminta untuk menjawab (*self rating*) berbagai pertanyaan yang diukur dengan skala Likert. Untuk mengukur tingkat komitmen, penelitian ini menggunakan 15 item yang dikembangkan oleh Modway et al. (1979) dengan skala 1 hingga 7. Sedang untuk mengukur tingkat penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD, penelitian

ini menggunakan 18 item yang dikembangkan oleh Dunham et al.'s (1989) dengan skala 1 hingga 7. Perlu dinyatakan bahwa kedua instrument dimodifikasi seperlunya sesuai dengan keadaan dan tujuan penelitian ini. Adanya tiga titik waktu penelitian, maka tingkat dan perkembangan komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD dapat diketahui. Uji hipotesis dengan menggunakan cara uji Mann-Whitney.

Untuk menjawab isu penelitian 2, data sekunder diambil secara keseluruhan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa aturan dan praktik yang berhubungan dengan SIKD modern. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari (a) pustaka-pustaka relevan berkaitan dengan teori tentang SIKD modern; (b) pustaka-pustaka relevan yang membahas teori-teori tentang sikap dan perilaku berkaitan dengan hubungan kausalitas komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD; (c) aturan-aturan lama tentang SIKD, baik aturan dari pusat maupun dari lokal; (d) SIKD yang sedang berjalan dan berlaku yang digunakan dalam praktik kerja sehari-hari; dan (e) Aturan-aturan baru tentang SIKD, baik aturan dari pusat maupun dari lokal. Data sekunder ini diperoleh melalui perpustakaan dan wawancara, observasi, dan pengkopian dokumen kepada sumber data sekunder tersebut, yaitu ke berbagai pihak, khususnya pemda yang berkepentingan terhadap SIKD. Karena ada dua sifat data, primer dan sekunder, data diolah dengan dua cara, atas dasar kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu statistik bagi data primer dan pengolahan dengan cara-cara penafsiran bagi data sekunder.

E. Hasil Penelitian, Pembahasan dan Kesimpulan

Ada dua isu penelitian yang bersifat berbeda, yaitu isu penelitian akademis dan isu penelitian praktis. Atas dasar ini, hasil penelitian pun bersifat berbeda pula, yaitu **hasil penelitian yang bersifat akademis** dan **hasil penelitian yang bersifat praktis**. Semua hasil penelitian didasarkan pada survei di kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2003. Masing-masing hasil penelitian dijelaskan seperti berikut.

Hasil penelitian akademis terkait dengan isu penelitian 1 dan isu penelitian 3, dan rumusan hipotesis di atas. Ada tiga hal yang dijelaskan menyangkut hasil penelitian akademis, yaitu (1) profil demografi responden, (2) statistik deskriptif, dan (3) pengujian hipotesis. Tabel 1 berikut menggambarkan profil demografi responden. Dari tabel 1. tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai profil responden dari berbagai sudut pandang, meliputi (a) lima kelompok unit kerja di kabupaten Indragiri Hilir, (b) jenis kelamin, (c) umur, (d) pendidikan, dan (e) pengalaman kerja. Tabel 2 berikut menunjukkan deskripsi tingkat komitmen dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya tentang SIKD, dan uji beda. Rata-rata tingkat komitmen dan penggunaan tertinggi, baik sebelum maupun sesudah kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis, ada di sekretariat. Sebaliknya, rata-rata tingkat komitmen dan penggunaan terendah, baik sebelum maupun sesudah kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis, ada di kecamatan.

Tabel 1. Profil Responden

	Badan	Dinas	Kantor	Kecamat	Sekret.	TOTAL
Jumlah	7	20	5	17	2	51
Responden	26	82	17	69	13	207
Laki-laki	18	62	13	51	8	152
Perempuan	8	20	4	18	5	55
Umur = 35 - < 40	4	11	3	9	6	33
Umur = 40 - < 45	9	24	7	18	4	62
Umur = 45 - < 50	7	28	4	23	3	65
Umur = 50 - < 55	6	19	3	19	0	47
Berpendidikan. D3	8	22	5	27	2	64
Berpendidikan S1	15	53	11	42	7	128
Berpendidikan S2	3	7	1	0	4	15
Lama Kerja = 15 - < 20	6	10	6	8	8	38
Lama Kerja = 20 - < 25	18	59	10	56	5	148
Lama Kerja = 25 - < 30	2	13	1	5	0	21

Baik umur maupun lama kerja, satuan di atas adalah dalam tahun

Tabel 2. Statistik Deskripsi dan Uji Beda

	Badan	Dinas	Kantor	Kecamat	Sekret.	TOTAL
Jumlah	7	20	5	17	2	51
Responden	26	82	17	69	13	207
<i>Sebelum Treatment (Sosialisasi dan Pendampingan Teknis)</i>						
Tingkat Komitmen	941	2,605	562	2,066	535	6,709
Tingkat Penggunaan	1,347	4,094	825	2,153	730	9,149
Rata ² Tingkat Komitmen	2.41	2.12	2.20	2.00	2.74	2.16
Rata ² Tingkat Penggunaan	2.88	2.77	2.70	1.73	3.12	2.46
<i>Sesudah Treatment (Sosialisasi dan Pendampingan Teknis)</i>						
Tingkat Komitmen	1,704	5,277	1,076	4,026	983	13,066
Tingkat Penggunaan	2,265	7,026	1,432	5,577	1,165	17,465
Rata ² Tingkat Komitmen	4.37	4.29	4.22	3.89	5.04	4.21
Rata ² Tingkat Penggunaan	4.84	4.76	4.68	4.49	4.98	4.69
<i>Uji Beda</i>						
Tingkat Komitmen	2.698 *** (0.004)	2.948*** (0.003)	2.896 *** (0.003)	2.573*** (0.004)	3.726*** (0.000)	2.916*** (0.003)
Tingkat Penggunaan	2.687*** (0.004)	2.763*** (0.004)	2.732*** (0.004)	4.274*** (0.000)	2.484*** (0.005)	3.074*** (0.002)

* Signifikan pada $p < 0,1$; ** Signifikan pada $p < 0,05$; *** Signifikan pada $p < 0,01$

Uji statistik tabel 2 menunjukkan dan menyimpulkan bahwa H_0 yang menyatakan tidak ada perbedaan tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah penyampaian rancangan SIKD baru, baik di tingkat seluruh kabupaten maupun di masing-masing unit kerja ditolak. Interpretasi dari hasil uji statistik ini adalah bahwa upaya peneliti mensosialisasi dan memberikan bimbingan teknis tentang rekonstruksi rancangan SIKD baru adalah berhasil. Ada perubahan secara signifikan mengenai pemahaman, persepsi, dan penggunaan aparat pemda terhadap aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD.

Berkaitan dengan **hasil penelitian praktis** dapat dijelaskan berikut. Hasil penelitian yang disampaikan dalam paparan ini, hanya pokok-pokoknya saja. Hasil penelitian praktis lebih rinci disajikan dalam penyajian makalah, namun tidak disampaikan dalam paparan ini, mengingat keterbatasan tempat.

Secara garis besar hasil penelitian praktis yang disampaikan dalam format pokok-pokoknya saja yang dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu (a) bagian penyusunan dan penetapan APBD, (b) bagian pelaksanaan APBD, dan (c) pertanggungjawaban APBD (sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah).

SIKD BARU	SIKD LAMA
Basis aturan : UU 22 dan 25 / 99, PP 105 hingga 110 / 2000, dan aturan lainnya.	Basis aturan : UU 5/74, PP 5 dan 6 / 75.
Penyusunan dan Penetapan APBD	
Struktur APBD : Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Hanya mencakup dana desentralisasi.	Pendapatan dan Belanja. Meliputi dana desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Asas anggaran defisit.	Asas anggaran berimbang dan dinamis.
Pos pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.	Tidak ada pos pembiayaan.
Pendapatan berasal dari pemerintah atasan berupa dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.	Pendapatan berasal dari pemerintah atasan berupa subsidi, bantuan, dan ganjaran.
Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan penerimaan pinjaman diperlakukan sebagai pembiayaan berupa penerimaan daerah.	Sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan penerimaan pinjaman diperlakukan sebagai pendapatan daerah.
Pembayaran pinjaman diperlakukan sebagai pembiayaan berupa pengeluaran daerah.	Pembayaran pinjaman diperlakukan sebagai belanja daerah.

<p>Belanja daerah terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.</p>	<p>Belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.</p>
<p>Proses penyusunan anggaran daerah meliputi: (a) penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, (b) penyusunan strategi dan prioritas APBD, (c) penyusunan usulan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja, (d) penyusunan rancangan APBD.</p>	<p>Tidak jelas.</p>
<p>Partisipasi masyarakat ditingkatkan melalui pengembangan instrument penjangkauan aspirasi masyarakat.</p>	<p>Kurang partisipatif dan aspiratif.</p>
<p>DPRD berperan dan terlibat dalam perumusan kebijakan anggaran.</p>	<p>Kurang melibatkan peran DPRD.</p>
<p>Penyusunan APBD menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada keluaran dan hasil.</p>	<p>Penyusunan APBD menggunakan pendekatan line item dan incrementalism yang berorientasi pada input.</p>
<p>Proses penyusunan lebih terintegrasi.</p>	<p>Proses penyusunan terfragmentasi.</p>
<p>Dokumen penyusunan anggaran unit kerja menggunakan rencana anggaran satuan kerja (RASK) dilampiri lembar kerja</p>	<p>Dokumen penyusunan anggaran unit kerja menggunakan DUKDA-DUPDA, dilampiri lembaran kerja.</p>
<p>Penetapan APBD: (a) rancangan perda APBD beserta lampirannya disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dimintakan persetujuannya; (b) rancangan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh kepala daerah menjadi perda APBD; (c) perda APBD ditindak lanjuti dengan keputusan kepala daerah tentang penjabaran APBD; dan (d) berdasarkan perda APBD kepala daerah menetapkan rencana anggaran satuan kerja menjadi dokumen anggaran satuan kerja.</p>	<p>Tidak jelas.</p>
<p>APBD disahkan oleh kepala daerah berdasarkan persetujuan DPRD</p>	<p>APBD disahkan oleh gubernur/mendagri</p>
<p>Rencana anggaran satuan kerja (RASK) ditetapkan menjadi dokumen anggaran satuan kerja (DASK)</p>	<p>DUKDA-DUPDA ditetapkan menjadi DIKD-DIPDA</p>

Pelaksanaan APBD

Bendahara Umum Daerah (BUD)	Kantor Kas Daerah
Satuan Pemegang Kas	Bendaharawan Projek & Rutin
Pemegang Barang	Bendaharawan Barang
Pembukuan Berpasangan (Akuntansi)	Pembukuan Tunggal
	Pemegang Kas Daerah di Bank BPD dihapus

Pelaporan APBD

Laporan Realisasi APBD, Nota APBD, Neraca, dan Laporan Aliran Kas	Laporan Realisasi APBD, dan Nota APBD
---	---------------------------------------

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan hal-hal berikut. Pertama, dengan melakukan *treatment* tertentu, penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara tingkat komitmen dan penggunaan aturan Otda, khususnya aturan tentang SIKD sebelum dan sesudah dilakukan sosialisasi dan pendampingan teknis. Kedua, rumusan rancangan SIKD baru sangat jauh berbeda dibanding dengan SIKD lama (MAKUDA). SIKD baru hanya mendasarkan pada satu dimensi saja, sedang rancangan SIKD baru mendasarkan pada berbagai dimensi yang diprediksi berpengaruh besar terhadap efisiensi dan efektifitas berjalannya SIKD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, D.A., R.R. Nelson, and P.A. Todd. 1992. "Perceived usefulness, ease of use, and information technology: A replication". *MIS Quarterly* 16. 227-247.
- Agho, A.O., C.W. Mueller, and J.L. Price. 1993. "Determinants of employee, job satisfaction: An empirical test of a causal model". *Human Relations*. 46. 1007-1027.
- Allport, G.W. 1967. *The historical background of modern social psychology*, in: C. Murchison. ed., *Handbook of sociology*. Clak University Press. Wocester. 798-844.
- Alwin, D.F. and R.M. Hauser. 1975. "The decomposition of effects in path analysis". *American Sociological Review* 40. 37-47
- Bandura, A.. 1982 "Self-efficacy mechanism in human agency". *American Psychologist* 37. 122-147.
- Bhagat, R.S. 1983. "Effects of stressful life events on individual performance effectiveness and work adjustment processes within organizational settings: A research model". *Academy of Management Review*. 8. 660-671.
- Brownell, P. and A.S. Dunk. 1991. "Task uncertainty and its interaction with budgetary participation and budget emphasis; Some methodological issues and empirical investigation". *Accounting Organization and Society* 16. 693-703.
- Chenhall, R.H. and P. Brownell. 1988. "The effect of participative budgeting on job satisfaction and performance: Ambiguity as an intervening variable". *Accounting Organization and Society*. 13. 225-233.
- Chin, J.P., V.A. Diehl, and K.L. Norman. 1988, "Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface". in: E. Soloway, D. Frye, and S. Sheppard. eds., *CHI'88 human factors in computing system conference proceedings* (Association of Computer Machinery, Washington D.C.) 213-218.
- Collison Black, R.D. 1990. *Utility*, in: J. Eatwell, M. Milligate, and P. Newman, eds., *The New Pelgrave: Utility and probability* (Macmillan, London) 259-302.
- Compeau, D.R. and C.A. Higgins, 1995. "Computer self-efficacy; Development of a measure and initial test". *MIS Quaterly*. 19. 18-211.
- Computer Week. 1995. "PCs get grunt for big business". *Computer Week*, Aug, 18, 25.
- Cooper, R. 1976. *Hoe jobs motivate*, in: M. Weir, ed., *Job satisfaction: Challenges and responses in modern Britain* (Fontana/Collins, London) 138-146.
- Davis, F.D.. 1989. "Perceived Usefulness, perceived ease of use, and user acceptance information technology". *MIS Quartely* 13. 319-340.
- Davis, F.D., R.P. Bagozzi, and P.R. Warshaw. 1989. "User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models". *Management Science* 35, 982-1003.
- Eveland, J.D. and T.K. Bikson, 1987. "Evolving electronic communication networks: An empirical assesment". *Office: Technology ang People* 3, 103-128.
- Ferguson, C. and P. Nevell, 1994. "Cross-sectional proxies of changes over time: An analysis of accountants attitudes toward using computers". *Paper presented at the Accounting Association of Australia and New Zealand Coference*, Wollongong.

- Fishbein, M. and I. Ajzen, 1975. *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and reserch* (Addison-Wesley, Reading, MA).
- Ginzberg, E., 1982. "The mechanization of work: Review of the macro impact of technology". *Scientific American* 247, 39-47.
- Ginzberg, M.J., 1981. "Early diagnosis og MIS implementation failure: Promising result and unanswered questions". *Management Science* 27. 459-478.
- Giulliano, V.E., 1982. "The mechanization if office work in the service industry". *Scientific American* 247. 125-134.
- Hackman, J.R. and G.R. Oldham, 1975 1980. *Work redesign* (Sddison-Wesley, Reading, M.A).
- Hatcher, M.E. and C. Coats, 1984. "A scale for measuring the acceptance of micro computers in the office at Sheller Globe Corporation." .In: *Proceedings of American Institute of Decision Sciences (Western Region) Conference (Kahuka Oahu, Hawaii)*.
- Hatcher, M.E. and T.R. Diebert, 1987. "Predicting end-user acceptance of microcomputer in the workplace". *International Journal of Man-Machine Studies* 26. 695-705.
- Herzberg, F., 1966, *Work and the nature of man* (World Publishing Company, New York).
- Hill, T., N.D. Smith, and M.F. Mann, 1987. "Role of efficacy expectations in predicting the decision to use advanced technolgies: The case of computers". *Journal of Applied Physiology* 72. 307-313.
- Hoeard, G.S., 1986, *Computer anxiety and the use of microcomputers in management* (UMI Research Press, Ann Arbor, MI).
- Igbaria, M., 1994. "an examination of the factors contributing to mlcocomputer technology acceptance". *Accounting, Management and Information Technology* 4, 205-224.
- Irving, R.H., C.A. Higgins, and F.R. Safayeni, 1986. "Computerize performance monitoring systems: Use and abuse". *Communications of the ACM* 29, 794-800.
- Ives, B.I., M.H. Olson, and J.J. Baroudi, 1983. "The measurement of user satisfaction". *Commucations of the ACM* 26, 785-793.
- King, W.R. and J.I. Rodriguez, 1978. "Evaluating management information system," *MIS Quartely* 2, 43-51.
- Kling, R., 1978. *The impact of computing upon the work of managers, data analysts and clerks* (University of California Irvine, Irvine).
- Kraut, R., S. Dumais, and S. Koch, 1989. „Computerization, productivity, and quality of worklife". *Communications of the ACM* 32, 220-238..
- Lepore, S.J., R. Kling, S. Iacono, and J. George, 1989, "Implementing dekstop computing, infrastructure, and quality of worklife". in: *SIM annual conference proceedings*, 223-235.
- Long, R.J., 1993. "The impact of new office information technology on job quality of female and male employees". *Human Relations* 46. 939-961.
- Lucas, H.C., 1975, "Performance and the use of an information system". *Management Science* 21, 908-919.

- McCroskey, J.C. and T.J. Young, 1979. "The use and abuse of factor analysis in communication research". *Human Communication Research* 5, 375-382.
- Medcof, J.W., 1989. "The effect of extent of use of information technology and job of the user upon task characteristic". *Human Relation* 42, 23-41.
- Miller, J., 1989. "Information systems effectiveness: The fit between business needs and system capabilities". in: *SIM annual conference proceedings*, 273-287.
- Mumford, E., 1972, *Job satisfaction* (Longman, London).
- Nevell, P., 1991, "an investigation of the effects of computer spreadsheets on cognitive decision behavior". *PhD thesis* (The University of Queensland).
- O'Brien, G.E. and P. Humphrys, 1982. "The effects of congruency between work values and perceived job attributes upon the job satisfaction of pharmacists". *Australian Journal of Psychologists* 34, 91-101.
- Parasuraman, S., and M. Igbaria, 1990. "An examination of gender differences in the determinants of computer anxiety and attitudes toward microcomputers among managers". *International Journal of Man-Machine Studies* 32, 327-340.
- Pentland, B.T., 1989. "Use and productivity in personal computing: An empirical test," in: *SIM annual conference proceedings*, 211-222.
- Quinn, J.B., J.J. Baruch, and P.C. Paquette, 1987, "Technology in services". *Scientific American* 257, 24-32.
- Rafaelli, A., 1986. "Employee attitudes toward working with computers". *Journal of Occupational Behavior* 7, 89-106.
- Reed, S.R., 1989. "The top 100 companies with PCs". *Personal Computing*, Sept 70-90.
- Robey, D., 1979. "User Attitudes and management information system use". *Academy of Management Journal* 22, 527-538.
- Robey, D., and R.F. Zeller, 1978, "Factors affecting the success and failure of an information system for product quality". *Interfaces* 8, 70-75.
- Schewe, C.D., 1976. "The management of the information system user. An exploratory analysis". *Academy of Management Journal* 19, 577-590.
- Specht, D., 1975. "On the evaluation of causal models". *Social Science Research* 4, 113-133.
- Speilberger, C.D., 1966. *Anxiety and behavior* (Academic Press, New York).
- Stumphf, S.A. and P.K. Dawley, 1981. "Predicting voluntray and involuntary turnover using absenteeism and performance indices". *Academy of Management Journal* 24, 148-163.
- Swanson, E.B., 1982. "Measuring user attitudes in MIS research: A review". *Omega* 10, 157-165.
- Szajna, B., 1996, "Empirical evaluation of the revised technology acceptance model". *Management Science* 42, 85-92.
- Taber, T.D. and E. Taylor, 1990, "A review and evaluation of the psychometric properties of the job diagnostic survey". *Personnel Psychology* 43, 465-500.

- McCroskey, J.C. and T.J. Young, 1979. "The use and abuse of factor analysis in communication research". *Human Communication Research* 5, 375-382.
- Medcof, J.W., 1989. "The effect of extent of use of information technology and job of the user upon task characteristic". *Human Relation* 42, 23-41.
- Miller, J., 1989. "Information systems effectiveness: The fit between business needs and system capabilities". in: *SIM annual conference proceedings*, 273-287.
- Mumford, E., 1972, *Job satisfaction* (Longman, London).
- Nevell, P., 1991, "an investigation of the effects of computer spreadsheets on cognitive decision behavior". *PhD thesis* (The University of Queensland).
- O'Brien, G.E. and P. Humphrys, 1982. "The effects of congruency between work values and perceived job attributes upon the job satisfaction of pharmacists". *Australian Journal of Psychologists* 34, 91-101.
- Parasuraman, S., and M. Igbaria, 1990. "An examination of gender differences in the determinants of computer anxiety and attitudes toward microcomputers among managers". *International Journal of Man-Machine Studies* 32, 327-340.
- Pentland, B.T., 1989. "Use and productivity in personal computing: An empirical test," in: *SIM annual conference proceedings*, 211-222.
- Quinn, J.B., J.J. Baruch, and P.C. Paquette, 1987, "Technology in services", *Scientific American* 257, 24-32.
- Rafaelli, A., 1986. "Employee attitudes toward working with computers". *Journal of Occupational Behavior* 7, 89-106.
- Reed, S.R., 1989. "The top 100 companies with PCs". *Personal Computing*, Sept 70-90.
- Robey, D., 1979. "User Attitudes and management information system use". *Academy of Management Journal* 22, 527-538.
- Robey, D., and R.F. Zeller, 1978, "Factors affecting the success and failure of an information system for product quality". *Interfaces* 8, 70-75.
- Schewe, C.D., 1976. "The management of the information system user. An exploratory analysis". *Academy of Management Journal* 19, 577-590.
- Specht, D., 1975. "On the evaluation of causal models". *Social Science Research* 4, 113-133.
- Spielberger, C.D., 1966. *Anxiety and behavior* (Academic Press, New York).
- Stumphf, S.A. and P.K. Dawley, 1981. "Predicting voluntary and involuntary turnover using absenteeism and performance indices". *Academy of Management Journal* 24, 148-163.
- Swanson, E.B., 1982. "Measuring user attitudes in MIS research: A review". *Omega* 10, 157-165.
- Szajna, B., 1996. "Empirical evaluation of the revised technology acceptance model". *Management Science* 42, 85-92.
- Taber, T.D. and E. Taylor, 1990. "A review and evaluation of the psychometric properties of the job diagnostic survey". *Personnel Psychology* 43, 465-500.

- Thompson, R.L., C.A. Higgins, and J.M. Howell, 1991. "Personal computing: Toward a conceptual model of utilization". *MIS Quartely* 15, 125-143.
- Triandis, H.C., 1980 *Values, attitudes, and interpersonal behavior*, in: *Nebraska symposium on motivation, 1979: Beliefs, attitudes, and values* (University of Nebraska, Lincoln, NE) 195-259.
- Trist, E., 1976, *Critique of scientific management in terms of socio-technical theory*, in: M. Weir, ed., *Job satisfaction: Challenges and responses in modern Britain* (Fontana/Collins, London) 81-90.
- Turner, J.A., 1984. "Computer mediated work: The interplay between technology and structured jobs". *Communications of the ACM* 27, 1210-1217.
- Vroom, V.H., 1964, *Work and motivation* (John Wiley and Sons, New York).
- Williamson, M.M. and P. Pence, 1989, *Wordprocessing and students writers*, in: B.K. Britton and S>M> Glynn, eds., *Computer writing environments: Theory, research, and design* (Lawrence Erlbaum Associates, NJ) 93-127.